

BAB 7

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Provinsi Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan Provinsi Jambi 2010-2015, sebagai berikut:

1. *Peningkatan infrastruktur wilayah dan Pelayanan umum*, dengan fokus :

- a) Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur Listrik
- b) Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih
- c) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan.

2. *Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta sosial budaya*, dengan fokus :

- a) Pemerataan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas
- b) Peningkatan Peran Agama dan Budaya Dalam Pembangunan
- c) Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga
- d) Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
- e) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan

3 *Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan*, dengan fokus :

- a) Meningkatkan Perekonomian Daerah
- b) Meningkatkan kepariwisataan daerah

4 Ketahanan pangan dan sumberdaya alam serta Lingkungan hidup, dengan fokus :

- a) Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan
- b) Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya mineral, Air, Lahan dan energi yang dapat diperbarukan.
- c) Peningkatan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup

5. Penataan Tata Pemerintahan yang baik, dengan fokus :

- a) Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik
- b) Peningkatan Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum
- c) Peningkatan Kesetaraan Gender

Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Dalam upaya mewujudkan Misi Pertama: Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Penataan Ruang, melalui program antara lain:

- (1) Program Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Program Penataan Kawasan.

b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Pengairan), melalui program antara lain:

- (1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rawa.
- (3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku/Air Tanah.
- (4) Program Pengendalian Banjir.
- (5) Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong.

c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Cipta Karya), melalui Program antara lain :

- (1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
- (2) Program Pengembangan Perumahan.
- (3) Program Pengembangan Kawasan Permukiman.
- (4) Program Pembangunan Saluran Drainase.
- (5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
- (6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

d. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Bina Marga), melalui program antara lain:

- (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- (2) Program Inspeksi Jalan dan Jembatan.
- (3) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.
- (4) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (5) Program Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Jembatan

e. Urusan Wajib Perhubungan, melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (2) Program Pengembangan Transportasi Perkotaan.
- (3) Program Pengembangan Terminal Terpadu Multi Moda.
- (4) Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- (5) Program Pengembangan Perkeretaapian.
- (6) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
- (7) Program Transportasi Udara.
- (8) Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

f. Urusan Pilihan Ketransmigrasian, melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- (2) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

g. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Potensi dan Kecukupan Energi Listrik dan Bahan Bakar
- (2) Program Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan.

2. Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Pendidikan melalui program antara lain :

- (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Program Wajib Belajar 12 tahun.
- (3) Program Pendidikan Menengah.
- (4) Program Pendidikan Non-Formal.
- (5) Program Pendidikan Luar Biasa.
- (6) Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan.
- (7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

b. Urusan Wajib Kesehatan melalui program antara lain :

- (1) Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- (2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
- (3) Program Pengawasan Obat dan Makanan.
- (4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan.
- (5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
- (6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
- (7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
- (8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
- (9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
- (10) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
- (11) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.
- (12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
- (13) Program Upaya Kesehatan Perorangan.
- (14) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
- (15) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
- (16) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata.
- (17) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.

c. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga, melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan.
- (2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
- (3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.

- (4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.
- (5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
- (6) Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Olah Raga.
- (7) Program Data Base Kepemudaan dan Keolah Ragaan.

d. Urusan Wajib Perpustakaan, melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Budaya Membaca dan Pembinaan Perpustakaan.
- (2) Pelestarian dan Pemeliharaan Bahan Pustaka

e. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
- (2) Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- (3) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- (4) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- (5) Program Pembinaan Anak Terlantar.
- (6) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
- (7) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
- (8) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).
- (9) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- (10) Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.

f. Urusan Wajib Kebudayaan melalui program antara lain:

- (1) Program Pengembangan Nilai Budaya.
- (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- (3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
- (4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

g. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi.
- (3) Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

h. Urusan Pilihan Ketrasmigrasian melalui program antara lain:

- (1) Program Transmigrasi Lokal.
- (2) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal.

3. Dalam upaya mewujudkan Misi Ketiga: Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM.
- (2) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM.
- (3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- (4) Program Pengembangan Kemitraan.
- (5) Program Perkuatan Permodalan UMKMK.
- (6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK.
- (7) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang kondusif.
- (8) Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKM

b. Urusan Wajib Penanaman Modal, melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- (2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- (3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

c. Urusan Wajib Ketenagakerjaan, melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
- (3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

d. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, melalui program antara lain:

- (1) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
- (2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- (4) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

- (5) Program Pengembangan Data dan Informasi.
- (6) Program peningkatan kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (7) Program Kerjasama Pembangunan
- (8) Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

e. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui program antara lain:

- (1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat.

f. Urusan Pilihan Industri, melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
- (2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- (3) Program Penataan Struktur Industri

g. Urusan Pilihan Perdagangan, melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
- (2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan.
- (4) Program Pengembangan Standarisasi Nasional.

h. Urusan Pilihan Pariwisata, melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- (3) Program Pengembangan Kemitraan.

i. Urusan Pilihan Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura), melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- (2) Program Peningkatan Nilai Tambah Agribisnis.
- (3) Program Peningkatan Pemasaran Produk Pertanian.

j. Urusan Pilihan Pertanian (Perkebunan) melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan.
- (2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

i. Urusan Pilihan Pertanian (Peternakan), melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan.

k. Urusan Pilihan Kehutanan, melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Kehutanan.

l. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dengan program sebagai berikut:

- (1) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
- (2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- (3) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

m. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral dengan program sebagai berikut:

- (1) Program Promosi Investasi Sektor Pertambangan dan Energi
- (2) Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Wilayah Tambang.

4. Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat: Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan;; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Ketahanan Pangan melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.
- (2) Program Lumbung Pangan.

b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Bina Marga) melalui program antara lain :

- (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

c. Urusan Wajib Lingkungan Hidup melalui program antara lain :

- (1) Program Pengendalian dan Pengrusakan Lingkungan.
- (2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- (3) Program Fasilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
- (4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

d. Urusan Pilihan Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura), melalui program antara lain

- (1) Program Pengembangan Sentra-sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian.
- (4) Program Perbaikan dan Penyediaan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana Pertanian

e. Urusan Pilihan Pertanian (Perkebunan), melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan.
- (2) Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan.
- (3) Program Pengembangan Proteksi Tanaman Perkebunan.
- (4) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan .
- (5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- (6) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

f. Urusan Pilihan Pertanian (Peternakan), melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
- (2) Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak.
- (3) Program Penerapan Teknologi Peternakan.
- (4) Program Pengembangan Peternakan.
- (5) Program Peningkatan Fungsi Kesmavet

h. Urusan Pilihan Kehutanan, melalui program antara lain :

- (1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
- (2) Program Kemitraan .
- (3) Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- (4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi.
- (5) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- (6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pembangunan Desa Mandiri Pangan dan Pembangunan Lumbung Desa.

i. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya.
- (2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
- (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

j. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Energi.
- (2) Program Survei Geologi dan Sumberdaya Mineral, Mitigasi Bencana Alam Geologi, dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral.
- (3) Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.
- (4) Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan dan Pertambangan.
- (5) Program Pembinaan dan Pengawasan K3 Pertambangan.
- (6) Program Pengembangan Sumur Tua dan Pengusahaan Migas.
- (7) Program Pengembangan Potensi Energi Lokal/Desa.

5. Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender.; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian melalui program antara lain :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- (4) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.
- (5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- (7) Program Pendidikan Kedinasan.
- (8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
- (9) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
- (10) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (11) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
- (12) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- (13) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- (14) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
- (15) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (16) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- (17) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- (18) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan.
- (19) Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
- (20) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- (21) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
- (22) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- (23) Program Pendataan dan Pembinaan PNS
- (24) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- (25) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- (26) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum
- (27) Program Perencanaan dan Perbantuan Hukum
- (28) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- (29) Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan
- (30) Program Penelitian dan Pengembangan.
- (31) Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
- (32) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi
- (33) Program Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial
- (34) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan SDA
- (35) Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi PNS

b. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika melalui program antara lain :

- (1) Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa.
- (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- (4) Program Pengembangan Pemetaan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
- (5) Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan

c. Urusan Wajib Kearsipan dengan program sebagai berikut:

- (1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
- (2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
- (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan.

d. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri dengan program sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Program Perwujudan Lembaga Demokrasi yang makin kokoh.
- (3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- (4) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- (5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

e. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- (3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- (4) Program Keluarga Berencana
- (5) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

f. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- (2) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
- (3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- (4) Program Penerapan Pemerintahan yang baik.
- (5) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Desa
- (6) Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PAUD

7.3 PROGRAM LINTAS BIDANG DAN LINTAS SKPD

Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan Jambi 2010-2015, selain program-program yang berdasarkan urusan diatas, juga ditetapkan program dan kegiatan baik lintas SKPD maupun lintas sektoral yang nantinya akan diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan menuju Jambi EMAS 2015 yang meliputi :

- (1) Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)
- (2) Pengembangan Revitalisasi Sungai Batanghari.
- (3) Pengembangan kawasan konservasi.
- (4) Pembangunan industri hilir.
- (5) Pengembangan Bandar Udara Sultan Thaha, Depati Parbo dan Bungo.
- (6) Pengembangan Pelabuhan Laut
- (7) Pembangunan *sport centre*
- (8) Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Adapun program dan kegiatan untuk mendukung kebijakan menuju Jambi EMAS dapat dilihat pada tabel 7.1. berikut :

Tabel 7.1.

**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Provinsi Jambi**

VISI : Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera									
MISI I : Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bid/urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur	Pemenuhan fasilitas infrastruktur pelayanan umum	1. Meningkatkan akses antara pusat-pusat permukiman dengan daerah belakangnya (hinterland), meningkatkan akses ke wilayah-wilayah potensial/sentra produksi yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar internasional	Jalan Provinsi dalam kondisi baik	31,36	75%	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Wajib	PU
							Program pembangunan jalan dan jembatan	Wajib	PU
				Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan;		100%	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Wajib	Dishub

			2. Pengembangan sistem prasarana transportasi terpadu, prasarana transportasi yang akan dikembangkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan wilayah Jambi secara serasi dengan wilayah-wilayah lainnya	Tersedianya dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan di Provinsi Jambi			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Wajib	Dishub
							Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Wajib	Dishub
							Program peningkatan pelayanan angkutan	Wajib	Dishub
							Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Wajib	Dishub
							Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Wajib	Dishub
							Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Wajib	Dishub

				Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut			Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Sungai dan laut	Wajib	Dishub
							Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Sungai dan laut	Wajib	Dishub
			3. Meningkatkan akses ke wilayah-wilayah potensial/ sentra produksi yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar internasional					Wajib	Dishub
			4. Pengembangan bandara sebagai salah satu landasan internasional di Sumatera	Meningkatnya kapasitas dan daya dukung pelabuhan udara di Provinsi Jambi antara lain Pelabuhan Udara Sultan Taha, Jambi, pelabuhan udara di Muara Bungo dan Sungai	1 lapangan udara	3 Lapangan Udara	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Udara	Wajib	Dishub
							Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara	Wajib	Dishub

				Penuh					
		Penyelenggaraan pembangunan fasilitas layanan transportasi daerah dan antar wilayah	1. Tersedianya infrastruktur pedesaan melalui pendekatan kewilayahan dalam rangka per-cepatan pembangunan desa tertinggal	terbangunnya sistem jaringan transportasi perkotaan dan pedesaan di wilayah terpencil, dan pedalaman, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;	100%	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Wajib	Dishub	
			2. Pengembangan Prasarana transportasi yang akan mendukung pemerataan pembangunan intra wilayah di Provinsi Jambi yang ditunjang dengan sistem prasarana transportasi sungai	Meningkatnya dermaga sungai		Pogram peningkatan pelayanan angkutan Sungai	Wajib	Dishub	

			Tersedianya rambu sungai			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Wajib	Dishub
			Revitalisasi sungai terlaksana untuk menunjang kelancaran transportasi sungai dan laut			Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Wajib	Dishub
			Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi sungai dan laut terutama untuk angkutan barang hasil industri, pertanian			Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Wajib	Dishub
		3. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas dan rambu jalan, penegakan	Terbangunnya terminal Type A Kota Jambi			Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan	Wajib	Dishub

		hukum dan disiplin di jalan						
			Terbangunnya dermaga penyeberangan di KualaTungkal (Lanjutkan)			Pembangunan Sarana dan Prasarana LLASDP	Wajib	Dishub
			Tersedianya fasilitas keselamatan LLAJ			Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Wajib	Dishub
			Terbangunnya sarana dan prasarana jembatan timbang			Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan	Wajib	Dishub
	Pengembangan dan penataan fasilitas infrastruktur yang telah dibangun	1. Mensinergiskan sistem infrastruktur dengan konsep tata ruang wilayah				Program penataan ruang	Wajib	PU
						Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Wajib	PU
			2. Mengharmenisasikan keterpaduan				Program Perencanaan Tata Ruang	Wajib

			sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah				Program Pemanfaatan Ruang	Wajib	PU
			3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan non formal milik pemerintah				Program pendidikan non formal	Wajib	Diknas
	2. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik	1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan terbarukan	1. Pengembangan energi menciptakan alternatif dari Potensi setempat dan Mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan	Peningkatan penggunaan energi terbarukan biodiesel			Program Pengembangan Energi	Pilihan	ESDM
			2. Pemulihan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil	Rasio elektrifikasi	55%	80%	Program Pengembangan Energi	Pilihan	ESDM

			dan pedesaan							
				Peningkatan Rasio elektrifikasi listrik pedesaan				Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Pilihan	ESDM
			3. Peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumberdaya energi	Jumlah PLTMH	9 unit	23 unit		Optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan	Pilihan	ESDM
				Jumlah PLTS Tahun 2015		7.084 unit		Optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan	Pilihan	ESDM
3. Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	1. Ketersediaan jaringan irigasi dan kebutuhan air bersih yang merata	1. Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan		Persentase tingkat kinerja pelayanan air minum masyarakat				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Wajib	PU
		2. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Wajib	PU

			3. Pendayagunaan sumber daya air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis	Tingkat pemanfaatan ketersediaan air baku			Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Wajib	PU
	2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air sebagai pendukung sistem jaringan irigasi di wilayah potensi	1. Penyelenggaraan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berbasis partisipasi masyarakat		Persentase jumlah prasarana sumber daya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi		43.485 ha	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Wajib	PU
		2. Penataan system irigasi dalam mendukung peningkatan pemanfaatan lahan dan produksi pertanian		Irigasi teknis yang belum dimanfaatkan	13.305	Termanfaatkan 100 %	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Wajib	PU
				Irigasi pedesaan yang belum dimanfaatkan	22 176	Termanfaatkan 100 %			

			3. Meningkatkan upaya pengendalian kecenderungan alih fungsi lahan, dengan mengoptimalkan sistem jaringan irigasi yang telah ada dan yang akan dibangun	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi		28.432 ha	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Wajib	PU
4. Terpenuhi-nya pembangu- nan infra- struktur pendidikan, kesehatan dan perumahan	1. Menciptakan kualitas dan kuantitas kebutuhan umum perumahan dan pemukiman	1. Pemenuhan dan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman		Persentase tersedianya perumahan sehat bagi masyarakat			Program Pengembangan Perumahan	Wajib	PU
				Terselenggara-nya bedah rumah bagi masyarakat miskin		25 000 unit			
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan dan pesisir					Program Lingkungan Sehat Perumahan	Wajib

			3. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat				Program Lingkungan Sehat Perumahan	Wajib	PU
			4. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat				Program Lingkungan Sehat Perumahan	Wajib	PU
	2. Meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai per-guruan tinggi	1. Penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan secara merata sebagai kebutuhan pelayanan dasar masyarakat luas	Rasio sekolah terhadap murid				Program Pendidikan Anak Usia Dini	Wajib	PU
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun							Wajib	PU	
Program Pendidikan Menengah							Wajib	PU	

							Program Pendidikan Non Formal	Wajib	PU
							Program Pendidikan Luar Biasa	Wajib	PU
			2. Peningkatan ketersediaan jaringan transportasi dalam mendukung mutu pendidikan pada wilayah-wilayah terpencil dan sulit terjangkau				Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Wajib	PU
		3. Pemenuhan fasilitas infrastruktur pelayanan kesehatan secara merata	1. Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan kesesuaian sarana prasarana dan tenaga medis secara merata				Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Wajib	PU
			2. Pendayagunaan akses pelayanan kesehatan melalui penyediaan mobilisasi					Wajib	PU

			keehatan						
Misi II : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bid/urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya	Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas	1. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pendidik dengan mengikuti standar pendidikan nasional	1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program WAJAR Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas	Meningkatnya jumlah SLTA			Program Pendidikan Menengah	Wajib	Diknas
				Meningkatnya jumlah sekolah kejuruan				Wajib	Diknas
				Meningkatnya jurusan Sekolah kejuruan			Wajib	Diknas	
				Meningkatnya APK SMA	72,98	85,6	Wajib	Diknas	
				Meningkatnya APM SMA			Wajib	Diknas	

			2. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik	Rasio Sekolah terhadap murid			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Wajib	Diknas
				Rasio Guru terhadap murid	14,73		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
							Program Pendidikan Non Formal		
							Program Pendidikan Luar Biasa		
		2. Penataan sistem pendidikan dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan yang didasari oleh indikator pendidikan yang lebih baik	1. Menyempurnakan manajemen pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan				Program Pendidikan Menengah	Wajib	Diknas
			2. Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat (miskin, daerah terpencil/ konflik, penyandang	Beasiswa Keluarga Miskin "SAMISAKE"		Rp. 1,31 M x 5 tahun = Rp 655 Milyar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Wajib	Diknas

			cacat)								
									Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
			3. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabel untuk melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas	Jumlah Beasiswa untuk Sekolah Dasar					Program Pendidikan Non Formal	Wajib	Diknas
				Jumlah Beasiswa untuk Pendidikan menengah Beasiswa S1					Program Pendidikan Luar Biasa	Wajib	Diknas
									Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Wajib	Diknas
				Beasiswa S2							
				Beasiswa S3			300 orang				
2. Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah	1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia	1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi dan kualitas manusia daerah Jambi		Jumlah karang taruna yang diberdayakan					Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Wajib	Dispora

			2. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan	Prestasi pada even nasional (PON)			Program peningkatan peran serta kepemudaan	Wajib	Dispora
			3. Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga dalam memacu prestasi dan prestise daerah	Jumlah olahraga prestasi			Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Wajib	Dispora
				Jumlah bibit prestasi usia dini dan remaja			Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Wajib	Dispora
							Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Wajib	Dispora
							Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Wajib	Dispora
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Wajib	Dispora

3. Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial	1. Meningkatkan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah KAT yang diberi bantuan			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Wajib	Sosnaker-trans	
			Jumlah penyandang cacat yang direhabilitasi panti asuhan			Program pembinaan anak terlantar	Wajib	Sosnaker-trans	
			Jumlah anak terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan dibina			Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Wajib	Sosnaker-trans	
			Jumlah lansia yang dilayani			Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Wajib	Sosnaker-trans	
						Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Wajib	Sosnaker-trans	
			2. Meningkatkan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia pelayanan kesejahteraan sosial			Jumlah SDM yang dilatih			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

			3. Mengembangkan dan menyasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial	Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan dan difasilitasi				Wajib	Sosnaker-trans
				Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang dilatih keterampilan berusaha				Wajib	Sosnaker-trans
			4. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial					Wajib	Sosnaker-trans
Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	1. Pengembangan jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu	Jumlah masyarakat yang mendapat jaminan sosial Jamkesprov (SAMISAKE)		Rp 21 Milyar	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Wajib	Diskes	
						Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Wajib	Diskes	
		2. Peningkatan pendidikan kesehatan pada	Angka harapan hidup			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Wajib	Diskes	

			masyarakat sejak usia dini			(Swadana)		
			3. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar	Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Wajib	Diskes
						Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Wajib	Diskes
						Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (Swadana)	Wajib	Diskes
						Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (Swadana)	Wajib	Diskes

						Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Swadana)	Wajib	Diskes
						Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (Swadana)	Wajib	Diskes
						Program Pengawasan Obat dan Makanan	Wajib	Diskes
						Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Wajib	Diskes
			4. Peningkatan sosialisasi terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat pada masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Wajib	Diskes
					Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Wajib	Diskes	
				Kunjungan rawat jalan		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Wajib	Diskes
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Swadana)	Wajib	Diskes	
			5. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga	Rasio Tenaga medis terhadap jumlah penduduk		Program Standarisasi Pelayanan	Wajib	Diskes

			medis secara merata				Kesehatan (Swadana)		
				Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup			Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (Swadana)	Wajib	Diskes
				Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup			Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Swadana)	Wajib	Diskes
				Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup			Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Wajib	Diskes
							Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Wajib	Diskes
							Program Peningkatan Balai Kesehatan	Wajib	Diskes
5. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas	1. Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas,	1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui peningkatan kualitas dan	Laju pertumbuhan penduduk				Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Wajib	BPPP dan KB
							Program pelayanan kontrasepsi	Wajib	BPPP dan KB

	serta penataan administrasi kependudukan yang baik dalam upaya mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk yang disesuaikan dengan daya tampung alam dan lingkungan	pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan	aksesibilitas pelayanan KB	Jumlah Akseptor			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Wajib	BPPP dan KB
			2. Memperkuat kelembagaan dan jaringan KB dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas				Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Wajib	BPPP dan KB
							Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	Wajib	BPPP dan KB
							Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Wajib	BPPP dan KB
							Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Wajib	BPPP dan KB
							Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Wajib	BPPP dan KB

			3. Menata kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan public	Laju pertumbuhan penduduk kota			Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Wajib	BPPP dan KB
--	--	--	---	--------------------------------	--	--	---	-------	-------------

	6 Terwujudnya kualitas kehidupan beragama melalui peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat serta terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai dikalangan umat beragama	Mengembangkan fungsi dan peran forum kerukunan umat beragama (FKUB)	Revitalisasi FKUB sehingga dapat menjadi lembaga yang optimal bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama	Menurunnya konflik keagamaan			Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama	Wajib	Biro Kesramas
			Optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat	Meningkatnya jumlah pondok pesantren			Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat	Wajib	Biro Kesramas
				Meningkatnya jumlah sarana peribadatan				Wajib	Biro Kesramas

6. Terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan	1. Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya daerah	1. Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas Provinsi Jambi				Program Pengembangan Nilai Budaya	Wajib	Disbudpar
		2. Mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Wajib	Disbudpar
		3. Menjadikan budaya lokal sebagai salah satu alat promosi daerah dengan mengedepankan budaya leluhur	Peningkatan peran budaya dan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan			Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Wajib	Disbudpar

Misi III : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bid/urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Mewujudkan Jambi dengan Struktur Ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengu-rangi praktik ekonomi tinggi	1. Menciptakan kondusifitas iklim investasi dan pendapatan daerah serta ekonomi daerah yang lebih baik	1. Penyederha-naan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran arus barang dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan dan pasar domestik	Pelayanan satu pintu	4 Kab/kota	11 Kab/Kota	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Wajib	BKPM
			2. Mengintegra-sikan pengem-bangan usaha sesuai dengan karakteristik daerah dan pengusaha serta potensi usaha di setiap daerah lingkup Provinsi Jambi	Nilai Investasi	10,76 T	22 T	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Wajib	BKPM
						Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Wajib	BKPM	
						Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Wajib	BKPM	

2. Tercapainya stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan	1. Tercapainya kondisi makro ekonomi yang stabil dengan peningkatan sektor ekonomi secara merata	1. Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi	Nilai Ekspor	Rp. 8,568 T		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pilihan	Disperindag
			Nilai Impor	Rp.10,334 T		Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Ekspor dan Importir Daerah	Pilihan	Disperindag
						Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	Pilihan	Disperindag
						Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Pilihan	Disperindag
	2. Menjaga stabilitas perekonomian daerah yang dasari oleh capaian indikator ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pilihan	Disperindag	
		Laju inflasi			Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Pilihan	Disperindag	

				PDRB atas harga berlaku			Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Pilihan	Disperindag
				Share PDRB harga berlaku				Pilihan	Disperindag
		3. Menciptakan inovasi baru dalam rangka memperkuat struktur perekonomian daerah dengan berbasis pada agro industri dan agribisnis dengan mengedepankan IPTEK	Jumlah Sentra industri kecil	70 unit	90 unit	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pilihan	Disperindag	
			Nilai Produksi industri	Rp 186 juta	Rp3,77 M	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pilihan	Disperindag	
						Program penataan struktur industri	Pilihan	Disperindag	
Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan	1. Peningkatan daya saing BUMD dalam pembangunan daerah	1. Memantapkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), (transparansi, akuntabilitas, keadilan dan tanggung jawab) dalam pengelolaan	Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD			Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Wajib	BKPM	

	terhadap pendapatan daerah		BUMD						
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat	2. Menciptakan Pemenuhan Kecukupan pangan daerah	1. Penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau	persentase kecukupan pangan			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Wajib	Bakorluh KP
			2. Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung				Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Wajib	Bakorluh KP

			produksi pangan						
			3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat				Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Wajib	Bakorluh KP
			4. Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Wajib	Bakorluh KP
		3. Meningkatnya produktivitas usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju	1. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi						

		pertumbuhan produktivitas	2. Mengembangkan UKM dengan pendekatan klaster pada sektor agribisnis dan agroindustri yang didukung adanya pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif	Jumlah UKM			Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pilihan	Diskop dan UKM
			3. Mengembangkan UKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM				Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pilihan	Diskop dan UKM

		4. Meningkatkan sistem dan strategi dalam menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi					Pilihan	Diskop dan UKM
		5. Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif					Pilihan	Diskop dan UKM
		2. Memperluas akses masyarakat, terhadap sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha					Pilihan	Diskop dan UKM
		3. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian di perdesaan melalui peningkatan kualitas dan kontinuitas				Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pilihan	Distan/ Disbun, Disnak

			suplai berbasis sumber daya lokal						
5. Meningkatkan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar melalui institusi dan lembaga sosial secara transparan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Wajib	Sosnakertrans	
		2. Meningkatkan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia pelayanan kesejahteraan sosial				Program pembinaan anak terlantar	Wajib	Sosnakertrans	
		3. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial				Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Wajib	Sosnakertrans	

			4. Meningkatnya mutu manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial				Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Wajib	Sosnakertrans
			5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak				Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Wajib	Sosnakertrans
							Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Wajib	Sosnakertrans
							Program pembinaan anak terlantar	Wajib	Sosnakertrans
							Program pembinaan anak terlantar	Wajib	Sosnakertrans
	6. Perbaiki iklim ketenagakerjaan dengan upaya	Terselenggaranya upaya-upaya untuk penurunan	1. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Wajib	Sosnakertrans

	menurunkan tingkat pengangguran	tingkat pengangguran	2. Menciptakan fleksibilitas pasar ker-ja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, out-sourcing, pengupahan, PHK serta jaminan keselamatan kerja				Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Wajib	Sosnakertr ans
			3. Meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan melalui pembekalan teknis dan peningkatan wawasan kerja				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Wajib	Sosnakertr ans
	7. Terwujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kualitas pelayanan dan	Menciptakan upaya peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama Serta Kehidupan Beragama				Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama	Wajib	Kessos

	pemahaman serta kehidupan beragama		2. Meningkatkan Kerukunan Intern dan Antar umat Beragama				Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat	Wajib	Kessos
	8. Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisataaan daerah	1. Menjadikan kepariwisataan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah	1. Meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri				Program Pengembangan Kemitraan	Wajib	Disbudpar
2. Optimalisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata, terutama yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi							Wajib	Disbudpar	
3. Peningkatan, pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah dengan peran serta pelaku usaha							Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan ekonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata	Wajib	Biro SDA

			dan masyarakat				Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan ekonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata	Wajib	Pemdes
	9. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	1. Menciptakan pusat pertumbuhan wilayah yang berdaya saing	1. Mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah-wilayah yang tertinggal				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Wajib	Pemdes

			2. Meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya				Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Wajib	Pemdes
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Wajib	Pemdes
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Wajib	Pemdes
							Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Wajib	Pemdes

Misi IV : Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bid/urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Menciptakan Pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan	1. Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan	1. Terwujudnya Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya Alam, Lahan dan Tambang	1. Menyelenggarakan revitalisasi pertanian untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan				Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan ekonomi di bidang pertanian dan kehutanan	Wajib	Biro SDA
			2. Pengamanan ketahanan pangan				Program Peningkatan Kesejahteraan	Pilihan	Distan/Disbun

							Petani		
			3. Peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Pilihan	Distan/Disbun
							Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pilihan	Distan/Disbun
							Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pilihan	Distan/Disbun
							Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pilihan	Distan/Disbun
							Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Pilihan	Distan/Disbun
							Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pilihan	Disnak

							Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pilihan	Disnak
							Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pilihan	Disnak
			4. Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu				Program peningkatan produksi peternakan	Pilihan	Disnak

		2. Menyelenggarakan penanganan dan pengelolaan sumberdaya alam dengan menjaga kelestarian lingkungan yang baik	1. Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dalam hal pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan serta penetapan kawasan hutan pada penataan ruang wilayah sesuai dengan peran dan fungsinya				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDH	Pilihan	Dishut
			2. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan				Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Pilihan	Dishut
			3. Memanfaatkan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungannya secara optimal				Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pilihan	Dishut

			4. Penetapan kawasan hutan dalam tata ruang sesuai dengan peran dan fungsinya				Program pemanfaatan kawasan hutan industri	Pilihan	Dishut
			5. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya				Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Pilihan	Dishut
			6. Penerapan iptek yang inovatif pada sektor				Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan	Pilihan	Dishut

			kehutanan				Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Pilihan	Dishut
							Program perencanaan dan pengembangan hutan	Pilihan	Dishut
	2. Terciptanya pemanfaatan potensi tambang skala kecil dan besar	1. Membuka peluang usaha tambang dengan didukung oleh aspek lingkungan dan sosial	1. Memperketat persyaratan reklamasi pasca tambang perusahaan pertambangan					Pilihan	ESDM
			2. Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup				Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Pilihan	ESDM
			3. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek lingkungan hidup				Pembinaan usaha pertambangan mineral dan batubara	Pilihan	ESDM
							Program Peningkatan Aksesibilitas Pemda, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa	Pilihan	ESDM

							Optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan	Pilihan	ESDM
							Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Pilihan	ESDM
		2. Mengurangi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta resiko Bencana Alam	1. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana				Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Pilihan	Dishut
							Program pengendalian kebakaran hutan	Pilihan	Dishut
							Program peningkatan pengendalian polusi	Pilihan	Dishut

			2. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup					Pilihan	Dishut
		3. Peningkatan pengelolaan ekosistem wilayah pesisir dan hasil produksi perikanan	1. Mengelola sumber daya kelautan secara lestari				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pilihan	Dishut
			2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya kelautan				Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Pilihan	Dislakan
	3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Pengurangan emisi dan peningkatan serapan dan simpanan karbon dari kegiatan konservasi hutan, pengelolaan	1. Peningkatan kualitas dan efektivitas kebijakan dan program konservasi untuk mencapai kemantapan pengelolaan hutan konservasi				Pemberdayaan Ekonomi masyarakat pesisir	Pilihan	Dislakan

		hutan lestari dan restorasi ekosistem	dan hutan lindung						
			2. Peningkatan upaya reboisasi hutan di kawasan hutan terdeforestasi secara transparan, akuntabel dan partisipatif, terutama di dalam kawasan hutan				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pilihan	Dishut
			3. Menciptakan perencanaan pembangunan pada sektor pertanian dan perkebunan, proyeksi perluasannya dan pemberian izin tidak pada kawasan hutan dan kawasan lain yang memiliki tutupan hutan yang masih dalam keadaan baik				Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Pilihan	Distan, Disbun, Dishut

	4. Penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan	1. Teciptanya sinkronisasi operasional penataan ruang wilayah	1. Mensinergikan konsep penataan ruang Provinsi Jambi dengan RTRW Nasional dan RTRW Kabupaten/Kota sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah)				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pilihan	Distan, Disbun, Dishut
			2. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi				Program Perencanaan Tata Ruang	Pilihan	Distan, Disbun, Dishut

			3. Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan tata ruang yang berpedoman pada produk hukum daerah				Program Pemanfaatan Ruang	Pilihan	Distan, Disbun, Dishut
MISI V : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang / urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Mewujudkan Kualitas Kinerja Birokrasi Pemerintah secara Profesional dalam Memenuhi Kepentingan Umum	1. Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik	1. Terciptanya perencanaan pembangunan yang berkualitas	1. Menciptakan kondisi kerja yang baik yang didukung dengan kemampuan SDM perencana yang berkualitas dalam mengimplementasikan dokumen perencanaan secara sinergi sesuai dengan peraturan yang berlaku				Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		Bappeda

			2. Terselenggaranya koordinasi perencanaan lingkup pemerintahan baik Pusat dan Daerah				Program pengembangan data/informasi		Bappeda
			3. Tersusunnya konsep perencanaan yang berkualitas dengan didasari oleh analisa study yang baik				Program Kerjasama Pembangunan		Bappeda
							Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		Bappeda
							Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		Bappeda
							Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		Bappeda
							Program perencanaan pembangunan daerah		Bappeda

							Program perencanaan pembangunan ekonomi		Bappeda
							Program perencanaan sosial dan budaya		Bappeda
							Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam		Bappeda
							Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana		Bappeda
							Program komunikasi dan informatika		Bappeda

		2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur di semua sektor sehingga pelaksanaan birokrasi pemerintahan dapat diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan etos kerja birokrasi serta budaya kerja yang memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Daerah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju pencapaian good governance dan clean government yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparatur				Survey dan publikasi data statistik pembangunan		Bappeda
							Program kajian dan penelitian pengembangan daerah		Balitbangda

			2. Pembentukan birokrasi yang profesional dengan membangun apa-ratur pemerintah Provinsi Jambi yang memahami etika birokrasi dan budaya kerja, pemahaman terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta penerapan komitmen percepatan pemberantasan KKN				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Bandiklat/ BKD
			3. meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi				Program Pendidikan Kedinasan		Bandiklat/ BKD

			4. Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, fungsional, DPRD, dan pengawasan masyarakat				Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Inspekto-rat
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Inspekto-rat
							Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Inspekto-rat
							Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		Inspekto-rat

		3. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan, serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi	1. Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui optimalisasi sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan				Program pembinaan dan pengembangan aparatur		Biro keuangan
							Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Biro keuangan
							Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota		Biro keuangan
			2. Pengelolaan pendapatan daerah yang menekankan pada keserasian antara kebutuhan pengeluaran dan pendapatan				Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		Biro keuangan

							Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Biro keuangan
							Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota		Biro keuangan
			3. Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional ber-dasarkan kebutuhan nyata daerah, hierarki pendek, bersifat jejaring, fleksibel dan adaptif, diisi banyak jabatan fungsional, dan terdesentralisasi kewenangannya, sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih				Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD		DPRD

			baik dan efisien, serta berhubungan kerja antar tingkat pemerintah, dengan DPRD, masyarakat, dan lembaga non pemerintah secara optimal sesuai dengan peran dan fungsinya						
							Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		Biro Pemerintahan/Biro Hukum
							Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		Biro Pemerintahan
							Program Penataan Daerah Otonomi Baru		Biro Pemerintahan
							Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik		Biro Pemerintahan

			4. Pengembangan sistem informasi terpadu (e-government) yang dapat memperlancar dan meningkatkan mutu layanan				Program penghimpunan data dan penyebaran informasi pembangunan daerah provinsi jambi		PDE
							Program Pemanfaatan Optimalisasi Pemanfaatan TI		
	2. Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum	1. Menciptakan budaya kerja yang berdasarkan pada ketaatan akan hukum dan perundang-undangan	1. Menghormati supremasi hukum, melalui perilaku keteladanan aparatur pemerintahan dalam mematuhi dan menaati hukum				Program pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah		Biro hukum/Organisasi

			2. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan				Program pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah		Biro hukum/Organisasi
			3. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil				Program pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah		Biro hukum/Organisasi

		2 Menciptakan harmonisasi kelembagaan hukum di daerah	1. memperkuat kelembagaan hukum di daerah	Jumlah Perda			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		Biro hukum/ Organisasi
				Jumlah Pergub					Biro hukum/ Organisasi
			2. Memberi perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu	Jumlah Masyarakat yang diberikan layanan Hukum			Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		Biro hukum/ Organisasi
				Jumlah masyarakat tidak mampu yang diberikan sertifikat gratis (SAMISAKE)		25.000 orang	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah		Biro hukum/ Organisasi
							Pengembangan sistem informasi pertanahan		Biro hukum/ Organisasi
	3. Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Membaiknya angka GDI (Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment	1. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, dengan ketersediaan data dan	Gender Development Index (GDI)			Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		BPPP dan KB

		Measurement)	peningkatan partisipasi masyarakat						
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		
			2. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik	persentasi Wanita di DPRD			Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		BPPP dan KB
				persentasi Wanita yang menjabat eselon					
			3. Memperkuat koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		BPPP dan KB
							Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		BPPP dan KB

							Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	BPPP dan KB
							Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	BPPP dan KB
			4. Pembinaan aparaturnya yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, penerapan dan penegakan hukum dan HAM, perlindungan hukum, kesadaran hukum dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan				Program Pendidikan Kedinasaan	BKD

			pembangunan yang tertib, teratur dan lancar						
							Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Badan Diklat
							Program pembinaan dan pengembangan aparatur		Badan Diklat /BKD

